

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab serta pelaksanaan PSU berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi melalui telaah pengawasan yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah terjadinya PSU akibat adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yang mencerminkan adanya kelemahan dalam proses pengawasan pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori pengawasan dari Soewarno, yang menganalisis permasalahan berdasarkan tiga aspek utama pengawasan: rencana (*planning*), perintah (*order*), dan tujuan serta kebijakan yang telah ditetapkan. Data dikumpulkan melalui metode wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan yang melibatkan pihak KPU, Bawaslu, Panwascam, dan petugas KPPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengawasan belum optimal, terutama dalam sosialisasi kepada masyarakat dan pelatihan petugas pemilu. Selain itu, koordinasi antara penyelenggara pemilu masih memiliki kelemahan dalam mitigasi dini terhadap potensi pelanggaran. Dari segi pelaksanaan, pengawas TPS dan Panwascam belum sepenuhnya mampu mendeteksi pelanggaran sebelum terjadi, yang menyebabkan keterlambatan dalam tindakan pencegahan. PSU di Desa Kembang Seri mencerminkan perlunya peningkatan sistem pengawasan yang lebih ketat, koordinasi yang lebih efektif, serta penyempurnaan regulasi agar pemilu mendatang dapat berlangsung lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: Pengawasan Pemilu, Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu dan KPU.

ABSTRACT

This study aims to analyze the causes and implementation of PSU based on the considerations of the Constitutional Court through a review of supervision conducted by the KPU and Bawaslu. The main problem in this study is the occurrence of PSU due to voters who are not registered in the Permanent Voters List (DPT) or the Additional Voters List (DPTb) which reflects weaknesses in the election supervision process. This study uses a descriptive qualitative approach with Soewarno's supervision theory which analyzes problems based on three main aspects of supervision, namely planning, orders, and objectives and policies that have been set. Data collection was carried out through interview methods, documentation, and literature studies involving KPU, Bawaslu, Panwascam, and KPPS officers. The results of the study indicate that supervision planning has not been optimal, especially in socialization to the community and training of election officers. In addition, coordination between election organizers still has weaknesses in early response to potential violations. In terms of implementation, TPS supervisors and Panwascam have not been fully able to detect violations before they occur, resulting in delays in prevention efforts. The PSU in Kembang Seri Village reflects the need for a tighter monitoring system, more effective coordination, and regulatory improvements so that future elections can be more transparent and accountable.

Keywords: Election Monitoring, Re-voting, Bawaslu and KPU.